



Paradiplomasi Provinsi DKI Jakarta Terkait Penyelenggaraan Formula E

Fadhil Ramadhan, Hermi Susiatiningsih, Fendy Eko Wahyudi

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip.undip.ac.id

ABSTRACT

Various kinds of international sporting events have been held in different branches and scales such as Olympics, Asian games, Football World Cup, Formula 1, Formula E and so on. Of the various kinds of international sporting events that exist, countries in the world compete with each other for positions as organizers. However, with the development of globalization, state is no longer the only actor competing to become the organizer of international sporting events. Currently, the regional government of a country is also competing to become the organizer of international sporting events, as is the case with the DKI Jakarta Provincial Government in collaboration with FEO to organize Formula E Jakarta. The foreign cooperation relationship carried out by DKI Jakarta Provincial Government and FEO in the context of organizing Formula E Jakarta itself is an example of paradiplomacy. This research aims to describe the process of paradiplomacy carried out by DKI Jakarta Provincial Government with FEO related to the implementation of Formula E using the concept of paradiplomacy and political system theory. This research uses a qualitative research approach with a descriptive type of research. The results of this research indicate that the paradiplomacy carried out by DKI Jakarta Provincial Government can be successful because of serious preparation and negotiation, as well as the common vision with FEO.

Keywords: *Paradiplomacy, Formula E, DKI Jakarta Provincial Government, FEO*

PENDAHULUAN

Saat ini olahraga tidak hanya menjadi aktivitas untuk menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh, melainkan telah menjadi industri dengan nilai jutaan dolar. Berbagai macam acara olahraga internasional telah diselenggarakan dalam cabang dan skala yang berbeda-beda seperti Olimpiade, Asian games, Piala Dunia Sepakbola, Formula 1, Formula E dan lain sebagainya. Dari berbagai macam acara olahraga internasional yang ada tersebut, negara-negara di dunia saling bersaing memperebutkan posisi sebagai penyelenggara. Seiring dengan berkembangnya globalisasi, negara tidak lagi menjadi aktor satu-satunya yang bersaing untuk menjadi penyelenggara acara olahraga internasional tersebut. Saat ini, pemerintah daerah suatu negara juga ikut bersaing untuk menjadi penyelenggara acara olahraga internasional, seperti halnya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yang bekerja sama dengan *Formula E Operations Limited* (FEO) untuk menyelenggarakan acara balap mobil listrik yaitu Formula E Jakarta. FEO di sini merupakan perusahaan yang memiliki lisensi dan mengoperasikan penyelenggaraan Formula E (Formula E, n.d.). Jakarta sendiri berhasil menjadi tuan rumah acara ini setelah

diumumkan oleh FEO melalui situs resmi Formula E (CNN Indonesia, 2019b).

Rencana awalnya Jakarta akan menjadi tuan rumah seri balapan Formula E pada 6 Juni 2020 (CNN Indonesia, 2019b). Namun, penyelenggaraan tersebut terpaksa ditunda karena adanya pandemi Covid-19 (Kompas, 2020). Jakarta kemudian menyelenggarakan Formula E pada tahun 2022, tepatnya pada tanggal 4 Juni 2022. Jakarta resmi menjadi tuan rumah Formula E musim ke-8 ini setelah ditetapkan melalui *FIA World Motor Sport Council* di Paris, pada 15 Oktober 2021 (Jakpro, 2021).

Penyelenggaraan Formula E Jakarta ini menjadi hal yang menarik karena jarang terjadi, di mana acara olahraga internasional diselenggarakan langsung oleh pemerintah daerah yang tentunya tidak memiliki nilai tawar yang kuat dan kedudukan yang tinggi dalam dunia internasional. Umumnya, penyelenggaraan acara olahraga internasional didominasi oleh negara atau lembaga negara yang memiliki *power* yang besar dalam dunia internasional. Hubungan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan FEO dalam rangka menyelenggarakan Formula E Jakarta sendiri menjadi salah satu contoh paradiplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Paradiplomasi merupakan hubungan luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau lokal dengan pihak asing dalam rangka mencapai kepentingan tertentu (Mukti, 2013).

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai proses paradiplomasi di bidang olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan FEO dalam rangka menyelenggarakan Formula E. Dalam hal ini terdapat beberapa proses yang perlu dijalani oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum bisa bekerja sama dengan FEO. Awalnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan proses pembuatan kebijakan luar negeri terkait pencalonan DKI Jakarta sebagai tuan rumah Formula E, termasuk di dalamnya pencetusan ide, proses pembahasan pencalonan diri, dan pembuatan keputusan untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah. Setelah diputuskan terkait pencalonan diri sebagai tuan rumah Formula E, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemudian mulai menghubungi dan melakukan negosiasi dengan FEO untuk bisa bekerja sama. Setelah melalui beberapa proses tersebut, DKI Jakarta kemudian bisa terpilih sebagai tuan rumah Formula E.

Untuk menjelaskan permasalahan yang ada dalam penelitian ini digunakan konsep paradiplomasi dan teori sistem politik David Easton. Konsep paradiplomasi membahas mengenai perilaku dan kapasitas *'sub-state'* atau pemerintah daerah dalam melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing dalam rangka mencapai kepentingan mereka secara spesifik. Dalam beberapa kesempatan pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan kerja sama luar negerinya sendiri, dan dalam banyak kasus, pemerintah daerah tidak selalu berkonsultasi dengan pemerintah pusat (Mukti, 2013). Untuk menjelaskan terkait pembuatan kebijakan luar negeri oleh pemerintah daerah, penelitian ini menggunakan teori sistem politik David Easton. Menurut teori sistem politik David Easton, keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah merupakan hasil konversi (proses) dari *inputs* yang diolah dalam sistem politik menjadi *outputs*. *Inputs* dalam sistem politik merupakan masukan kepada pemerintah berupa tuntutan maupun dukungan, sementara itu *outputs* merupakan keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan proses politik yang telah berlangsung (Easton, 1988). Konsep paradiplomasi dalam penelitian ini sendiri digunakan untuk menjelaskan proses paradiplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan FEO terkait pencalonan DKI Jakarta sebagai tuan rumah Formula E, sementara itu teori sistem politik David Easton digunakan untuk menjelaskan proses persiapan dan pembuatan keputusan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum mengajukan diri sebagai tuan rumah kepada FEO.

Penelitian sebelumnya mengenai penyelenggaraan acara olahraga internasional oleh pemerintah daerah di Indonesia sendiri belum banyak dibahas. Penelitian yang sudah ada lebih banyak membahas penyelenggaraan acara olahraga internasional yang diselenggarakan

oleh pemerintah Indonesia. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rahim Sazli (Sazli, 2016) membahas mengenai penyelenggaraan Asian Games 2018. Penelitian tersebut membahas mengenai motif Indonesia menyelenggarakan Asian Games yang didasari oleh dua kepentingan, yaitu politik dan ekonomi. Penelitian lainnya dilakukan oleh Miftahul Khausar (Khausar, 2020) yang juga membahas mengenai Asian Games 2018. Dalam penelitiannya, ia menganalisis diplomasi publik yang dilakukan Indonesia serta manfaat yang diperoleh Indonesia melalui Asian Games. Sementara itu, penelitian yang terkait dengan penyelenggaraan acara olahraga internasional oleh pemerintah daerah di Indonesia membahas mengenai Tour de Singkarak. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Ikhsan Alim (Alim, 2018) tersebut membahas mengenai pengaruh penyelenggaraan Tour de Singkarak terhadap peningkatan perekonomian Sumatera Barat melalui sektor pariwisata.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, penelitian ini akan membahas mengenai penyelenggaraan acara olahraga internasional oleh pemerintah daerah di Indonesia. Dalam hal ini dibahas mengenai proses paradiplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan FEO terkait penyelenggaraan Formula E. Penelitian ini berupaya menambah sudut pandang baru mengenai paradiplomasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menyelenggarakan acara olahraga internasional.

PEMBAHASAN

Pembuatan Keputusan Pencalonan DKI Jakarta sebagai Tuan Rumah Formula E

Sebelum mengajukan diri sebagai tuan rumah Formula E, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjalani beberapa proses terlebih dahulu hingga akhirnya memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai tuan rumah kepada FEO. Dalam teori sistem politik yang dirumuskan oleh David Easton, pemerintah dalam membuat keputusan atau kebijakannya akan melakukan proses konversi untuk megolah *inputs* yang ada ke dalam sistem politik untuk kemudian diubah menjadi *outputs*. *Inputs* dalam hal ini yaitu masukan kepada pemerintah berupa tuntutan maupun dukungan, sementara *outputs* merupakan keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan proses politik yang sudah berlangsung (Easton, 1988).

Dalam teori sistem politik ini terdapat 3 unsur utama yang menjadi bagian dari proses pembuatan keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Ketiga unsur tersebut yaitu *inputs*, sistem politik (konversi), dan *outputs*. Unsur pertama yaitu *inputs* yang merupakan masukan kepada pemerintah (Easton, 1988). Masukan ini dapat berupa tuntutan (*demands*) dan dukungan (*support*). Masukan berupa tuntutan dapat berasal dari dalam sistem (pemerintah) maupun luar sistem (masyarakat). Sementara itu, masukan yang berupa dukungan dapat berupa sikap maupun pandangan yang menyetujui suatu keputusan atau kebijakan (Pribadi & Muhyidin, 2014).

Inputs atau masukan terkait dengan pembuatan keputusan DKI Jakarta untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah Formula E sendiri berasal dari dalam sistem atau dari dalam Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri. Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, proses untuk pencalonan diri sebagai tuan rumah Formula E dilakukan oleh tim dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai lembaga eksekutif. Inisiasi untuk menyelenggarakan Formula E ini sendiri tidak terlepas dari tuntutan akan kondisi Jakarta yang menjadi salah satu kota paling terpolusi di dunia. Untuk itu dengan diselenggarakannya kejuaraan balap mobil listrik Formula E diharapkan dapat menjadi kampanye untuk udara bersih dan mendorong penggunaan kendaraan bebas emisi (CNN Indonesia, 2019a).

Unsur kedua yaitu sistem politik atau proses konversi. Dalam hal ini *inputs* yang sudah masuk ke pemerintah akan diproses atau dikonversi di dalam sistem politik untuk menghasilkan *outputs* berupa keputusan atau kebijakan (Easton, 1988). Terkait dengan

pencalonan DKI Jakarta sebagai tuan rumah Formula E, setelah adanya inisiasi dari dalam Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemudian mulai memproses untuk pembuatan keputusan. Dalam proses ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai lembaga eksekutif yang dipimpin oleh Gubernur Anies Baswedan mengerjakannya secara senyap dan tertutup (CNN Indonesia, 2019a). Selama proses pembuatan keputusan ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga melakukan studi terlebih dahulu untuk memperhitungkan keuntungan ekonomi yang akan didapatkan melalui penyelenggaraan Formula E di Jakarta. Berdasarkan *preliminary study* yang ada, setiap kali balapan Formula E diadakan maka akan menggerakkan perekonomian hingga lebih dari 78 juta Euro, atau Rp 1,2 Triliun (Baswedan, 2019).

Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai lembaga eksekutif berusaha mempersiapkan pencalonan DKI Jakarta untuk menjadi tuan rumah Formula E secara tertib dan rapi, sehingga prosesnya dilakukan secara tertutup. Hal ini agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat berkonsentrasi untuk mempersiapkan semua hal yang diperlukan. Anies Baswedan mengungkapkan bahwa timnya tidak ingin terlalu banyak pihak yang terlibat dalam proses awal karena ditakutkan akan mengganggu persiapan yang ada (Fitra Eri, 2019). Selain itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai lembaga eksekutif juga khawatir jika pembicaraan mengenai pencalonan DKI Jakarta sebagai tuan rumah dibahas secara terbuka, justru akan membuat kota-kota lain di dunia yang juga bersaing menjadi tuan rumah dapat melihat persiapan dan pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (CNN Indonesia, 2019a).

Pembuatan keputusan terkait dengan pencalonan DKI Jakarta sebagai tuan rumah Formula E dapat dilihat hanya melibatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai lembaga eksekutif dan tidak melibatkan DPRD Provinsi DKI Jakarta sebagai lembaga legislatif. Hal ini yang kemudian sempat menimbulkan protes dari DPRD Provinsi DKI Jakarta. Menurut Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai lembaga eksekutif melanggar prosedur karena melakukan negosiasi dan membuat perjanjian internasional dengan FEO untuk menyelenggarakan Formula E pada tahun 2019 tanpa persetujuan dari DPRD (tvOneNews, 2022). Menurutnya setiap perjanjian internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus melalui DPRD dan disetujui terlebih dahulu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Liputan6, 2021). Pada peraturan tersebut disebutkan bahwa DPRD Provinsi memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terkait rencana perjanjian internasional, serta berwenang untuk memberikan persetujuan terhadap perjanjian internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi (JDIH BPK RI, 2014).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai lembaga eksekutif sendiri baru melibatkan DPRD Provinsi DKI Jakarta setelah bernegosiasi dengan FEO dan mendapatkan kepastian bahwa Jakarta terpilih sebagai tuan rumah Formula E 2020. Penyelenggaraan Formula E Jakarta kemudian ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020. Menurut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, adanya penetapan penyelenggaraan Formula E dalam Perda menunjukkan adanya kesepakatan antara eksekutif dan legislatif (Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta, 2021).

Unsur Ketiga yaitu *outputs* yang merupakan keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan proses politik yang telah berlangsung. *Outputs* yang dibuat oleh pemerintah dapat berupa tindakan, keputusan administrasi, dekret, atau undang-undang (Easton, 1988). Terkait dengan keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai pencalonan diri sebagai tuan rumah Formula E, *output* yang ada yaitu berupa tindakan. Setelah memproses pencalonan DKI Jakarta sebagai tuan rumah Formula E, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menindaklanjutinya dengan melakukan negosiasi dan membuat

perjanjian dengan FEO untuk menyelenggarakan Formula E di Jakarta (CNN Indonesia, 2019a).

Berdasarkan proses politik yang terjadi dalam pencalonan DKI Jakarta sebagai tuan rumah Formula E, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan proses politik yang kurang sesuai dari teori sistem politik yang dirumuskan oleh David Easton. Dalam teori sistem politik tersebut, *inputs* berupa tuntutan atau dukungan akan diproses dalam sistem politik sesuai dengan proses politik yang ada dalam pemerintahan untuk kemudian diproses menjadi *outputs* berupa keputusan atau kebijakan (Easton, 1988). Terkait dengan proses pembuatan keputusan untuk pencalonan DKI Jakarta sebagai tuan rumah Formula E, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai lembaga eksekutif seharusnya terlebih dahulu membahas hal tersebut dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta sebagai lembaga legislatif. Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai lembaga eksekutif hanya melakukan proses pembentukan keputusan dalam tubuh internal saja setelah adanya *inputs*. Setelah melakukan proses pembentukan keputusan di internal, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai lembaga eksekutif mengeluarkan *output* berupa tindakan untuk menindaklanjuti pencalonan DKI Jakarta sebagai tuan rumah Formula E dengan bernegosiasi dan membuat perjanjian dengan FEO (CNN Indonesia, 2019a). Baru setelah DKI Jakarta mendapat kepastian untuk menjadi tuan rumah Formula E, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai lembaga eksekutif membuat kesepakatan dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta sebagai lembaga legislatif. Dalam hal ini disepakati mengenai penyelenggaraan dan penganggaran Formula E Jakarta yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta melalui Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang APBD Tahun Anggaran 2020 (Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta, 2021).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai lembaga eksekutif tentunya memiliki alasan tersendiri mengenai tidak dilibatkannya DPRD Provinsi DKI Jakarta yang merupakan lembaga legislatif dalam perumusan awal terkait pencalonan DKI Jakarta sebagai tuan rumah Formula E. Alasan utamanya yaitu karena tidak ingin adanya kegaduhan dan keributan di awal yang dapat mengganggu proses persiapan dan negosiasi dengan FEO (Fitra Eri, 2019). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai lembaga eksekutif juga memiliki kekhawatiran bahwa jika proses pencalonan DKI Jakarta sebagai tuan rumah Formula E dilakukan secara terbuka, maka kota-kota lain di dunia yang juga bersaing menjadi tuan rumah dapat melihat persiapan dan pekerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (CNN Indonesia, 2019a). Selain itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tentunya juga memiliki keyakinan bahwa pada akhirnya DPRD Provinsi DKI Jakarta akan memberikan persetujuan terkait penyelenggaraan Formula E Jakarta. Anies Baswedan meyakini bahwa penyelenggaraan Formula E adalah hal yang baik dan akan memberikan banyak manfaat bagi DKI Jakarta terutama dari segi ekonomi (Tempo, 2019b). DPRD Provinsi DKI Jakarta sendiri akhirnya memberikan persetujuan terhadap penyelenggaraan dan penganggaran Formula E Jakarta. Hal ini terjadi karena DPRD Provinsi DKI Jakarta melihat penyelenggaraan Formula E sebagai terobosan baru yang dibuat oleh Gubernur Anies Baswedan untuk mengurangi polusi udara di DKI Jakarta. Selain itu, penyelenggaraan Formula E juga dianggap dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah DKI Jakarta (BeritaSatu, 2019).

Proses Paradiplomasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan FEO

Setelah melakukan proses pembuatan keputusan terkait pencalonan DKI Jakarta sebagai tuan rumah Formula E, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemudian menjalin hubungan dan melakukan negosiasi dengan FEO selaku perusahaan yang mengoperasikan dan memiliki lisensi penyelenggaraan Formula E. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan paradiplomasi yaitu aktivitas hubungan luar negeri yang dilakukan oleh

sub-state atau pemerintah daerah dengan pihak asing dalam rangka mencapai kepentingan tertentu (Mukti, 2013). Pihak asing di sini yaitu FEO yang merupakan perusahaan internasional dan juga menjadi aktor *non-state*. Sementara itu, kepentingan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui paradiplomasi ini yaitu penyelenggaraan Formula E Jakarta. Dengan adanya penyelenggaraan balap mobil listrik tersebut di Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memanfaatkannya untuk mencapai berbagai kepentingan daerah seperti investasi, pariwisata, dan lingkungan (Kontan, 2019).

Dalam proses paradiplomasi untuk menyelenggarakan Formula E Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan negosiasi dan pembicaraan yang cukup lama dengan FEO. Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, proses pembicaraan awal antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan FEO dimulai sekitar bulan Februari tahun 2019. Kemudian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempersiapkan keseluruhan hal yang diperlukan untuk pencalonan DKI Jakarta sebagai tuan rumah Formula E (Fitra Eri, 2019). Setelahnya pada tanggal 8-9 Juli 2019 tim dari FEO datang secara khusus ke Jakarta untuk melakukan uji lapangan (Tempo, 2019a). Pada saat itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan 5 lokasi yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan balapan Formula E. FEO kemudian memilih 2 lokasi terbaik yang akan digunakan untuk menyelenggarakan Formula E (BeritaSatu, 2021).

Kedua lokasi tersebut berada di sekitar kawasan Monas. Lokasi pertama yaitu Silang Monas Tenggara - Jalan MI Ridwan Rais - Tugu Tani - Jalan MI Ridwan Rais - Jalan Medan Merdeka Selatan - Wisma Antara - Jalan Medan Merdeka Selatan - Silang Monas Tenggara. Sementara itu, lokasi kedua melewati Silang Monas Selatan - Jalan Medan Merdeka Selatan - Stasiun Gambir - Jalan MI Ridwan Rais - Jalan Medan Merdeka Selatan - Bundaran Air Mancur - Silang Monas Selatan (BeritaSatu, 2021).

Proses negosiasi dan pembicaraan dengan FEO sendiri dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara senyap tanpa banyak diketahui orang. Menurut Gubernur Anies Baswedan hal ini dikarenakan Jakarta bersaing dengan kota-kota lain di dunia untuk bisa menjadi tuan rumah Formula E. Untuk itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berusaha mempersiapkan negosiasi dan pembicaraan dengan FEO secara tertib dan rapi tanpa melibatkan banyak orang (CNN Indonesia, 2019a).

Puncak dari negosiasi dan pembicaraan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan FEO berlangsung pada tanggal 13 Juli 2019 di New York, Amerika Serikat, di mana Gubernur Anies Baswedan melakukan pembicaraan dengan FEO untuk menjadikan DKI Jakarta sebagai tuan rumah Formula E. Pada saat itu Anies Baswedan sedang melakukan kunjungan kerja selama 10 hari dari tanggal 9-19 Juli 2019 ke Kolombia dan Amerika Serikat. Terdapat banyak agenda yang dilakukan Anies Baswedan dalam kunjungan tersebut, termasuk di dalamnya untuk bertemu dengan petinggi FEO dan membicarakan mengenai pencalonan DKI Jakarta sebagai tuan rumah Formula E (BeritaSatu, 2021).

Pada tanggal 13 Juli 2019, Gubernur Anies Baswedan berangkat menuju ke New York, Amerika Serikat setelah mengunjungi Kolombia di mana Anies Baswedan menjadi pembicara dalam *World Cities Summit Majors Forum* (WCSMF). Pada saat Anies Baswedan mengunjungi New York tersebut, Formula E tengah digelar di sana. Gubernur Anies Baswedan dalam kunjungannya tidak hanya sekedar menonton kejuaraan balap mobil listrik tersebut, melainkan juga bertemu dan bernegosiasi dengan pimpinan FEO untuk menjadikan DKI Jakarta sebagai tuan rumah Formula E. Dalam hal ini Gubernur Anies Baswedan bertemu dan bernegosiasi dengan Alejandro Agag dan Alberto Longo selaku pimpinan FEO (Kompas, 2022).

Dalam pertemuannya dengan pimpinan FEO tersebut, Gubernur Anies Baswedan menyebutkan bahwa pertemuan berlangsung selama 3 jam di mana Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta yang dipimpin oleh Gubernur Anies Baswedan dan FEO saling melemparkan ide untuk dibahas bersama. Sama halnya dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pihak FEO juga merasa tertarik dan bersemangat dengan rencana penyelenggaraan Formula E Jakarta (CNN Indonesia, 2019a).

Berdasarkan pertemuan dan negosiasi yang berlangsung, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Gubernur Anies Baswedan menyampaikan berbagai macam hal yang bisa ditawarkan oleh Jakarta kepada FEO. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan FEO dalam pertemuannya saling menyodorkan ide dan merasa bahwa publik Jakarta sudah sangat siap untuk menyelenggarakan Formula E. Dalam pertemuan ini sendiri Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan kepada FEO bahwa Jakarta sedang dalam masa transformasi, di mana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah bersiap memasuki era baru untuk menggunakan kendaraan bebas emisi dan memulainya dengan penggunaan bus listrik serta pembangunan transportasi yang ramah lingkungan. Selain itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyampaikan bahwa Jakarta memiliki tantangan sebagai salah satu kota paling terpolusi di dunia. Untuk itu kampanye untuk udara bersih melalui kejuaraan balap mobil yang bebas emisi diharapkan akan dapat membantu Jakarta. Gubernur Anies Baswedan dalam pembicaraannya dengan pimpinan FEO juga menyampaikan dengan tegas bahwa penyelenggaraan Formula E Jakarta melampaui dari sekedar urusan bisnis, melainkan juga menyangkut tentang pilihan ideologi. Anies Baswedan menyampaikan kepada FEO bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menginginkan Jakarta menjadi kota yang ramah lingkungan dan jika Formula E diadakan di Jakarta maka FEO akan membantu Jakarta dalam usaha ini (CNN Indonesia, 2019a).

Setelah pertemuan tersebut akhirnya diputuskan bahwa DKI Jakarta akan menjadi tuan rumah Formula E tahun 2020. Sesudah berhasil menyepakati Jakarta sebagai tuan rumah Formula E, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemudian segera mempersiapkan semua hal yang diperlukan termasuk di dalamnya mengenai waktu pelaksanaan dan lokasi balapan (CNN Indonesia, 2019a). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya secara resmi mengumumkan bahwa DKI Jakarta akan menjadi tuan rumah Formula E pada 6 Juni 2020 melalui Konferensi Pers Jakarta E-Prix 2020 pada tanggal 20 September 2019 di Monas, Jakarta Pusat (Kompas, 2019).

Dalam Konferensi Pers Jakarta E-Prix 2020 sendiri, *Chief Championship Officer* (COO) FEO, Alberto Longo menyampaikan bahwa alasan FEO menyetujui DKI Jakarta sebagai tuan rumah Formula E karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan FEO memiliki visi yang sama. Visi ini yaitu bahwa kita perlu untuk menjaga planet kita dan keberlangsungan kehidupan manusia. Salah satu hal yang perlu diperhatikan yaitu terkait dengan polusi yang telah menyebabkan kematian bagi banyak orang. Untuk itu penggunaan kendaraan listrik menjadi salah satu hal yang dapat mengurangi polusi udara. Kehadiran Formula E sendiri menurut Alberto Longo selain untuk menyelenggarakan balapan juga untuk mempromosikan penggunaan kendaraan listrik sebagai alat transportasi yang bebas emisi (PEM PROV DKI JAKARTA, 2019).

Hubungan kerja sama luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan FEO terkait penyelenggaraan Formula E sendiri dapat dilihat termasuk ke dalam konsep paradiplomasi yang dijelaskan oleh Takdir Ali Mukti. Mukti menjelaskan paradiplomasi sebagai aktivitas hubungan luar negeri yang dilakukan oleh *sub-state* yaitu pemerintah daerah dengan pihak asing dalam rangka mencapai kepentingan tertentu (Mukti, 2013). Terdapat 3 unsur yang menjadi fokus utama dalam paradiplomasi ini yaitu pemerintah daerah, pihak asing, dan kepentingan tertentu. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi pemerintah daerah yang bekerja sama dengan pihak asing yaitu FEO yang merupakan perusahaan internasional dan aktor *non-state*. Sementara itu, kepentingan

yang berusaha dicapai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam paradiplomasi ini yaitu penyelenggaraan Formula E Jakarta.

Terkait dengan penyelenggaraan pertama Formula E Jakarta atau Jakarta E-Prix telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 di Sirkuit JIEC (*Jakarta E-Prix International Circuit*) Ancol (Merdeka, 2022). Penyelenggaraan Formula E Jakarta ini rencana awalnya akan digelar pada 6 Juni 2020 (CNN Indonesia, 2019b). Namun, penyelenggaraan tersebut harus ditunda karena adanya pandemi Covid-19 (Kompas, 2020). Penyelenggaraan Formula E Jakarta 2022 sendiri tercatat ditonton oleh 60 ribu orang, di mana sebanyak 20 ribu orang berada di sirkuit, sementara 40 ribu lainnya menonton di sekitaran Ancol menggunakan layar besar (TribunJakarta, 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang ada, dapat dilihat bahwa ada prosedur yang kurang sesuai dengan teori sistem politik David Easton pada proses pencalonan DKI Jakarta sebagai tuan rumah Formula E, yaitu pada proses pembuatan keputusan. Pada proses ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai lembaga eksekutif tidak melibatkan DPRD Provinsi DKI Jakarta sebagai lembaga legislatif yang berwenang untuk memberikan persetujuan mengenai kerja sama luar negeri dan baru melibatkan DPRD setelah Jakarta terpilih sebagai tuan rumah. Hal ini dikarenakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai lembaga eksekutif tidak ingin ada keributan di awal yang dapat mengganggu proses negosiasi dengan FEO, serta adanya kekhawatiran bahwa kota-kota lain di dunia yang juga bersaing untuk menjadi tuan rumah Formula E dapat melihat persiapan dan pekerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga memiliki keyakinan bahwa DPRD Provinsi DKI Jakarta sebagai lembaga legislatif akan menyetujui penyelenggaraan Formula E Jakarta karena hal tersebut merupakan sesuatu yang baik dan akan memberikan banyak manfaat bagi DKI Jakarta. DPRD Provinsi DKI Jakarta sendiri pada akhirnya memang memberikan persetujuan terhadap penyelenggaraan dan penganggaran Formula E Jakarta karena dianggap merupakan terobosan baru dalam upaya mengurangi polusi udara di DKI Jakarta, serta dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah DKI Jakarta. Meskipun terdapat prosedur yang berbeda, proses paradiplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan FEO tetap berhasil mencapai kepentingan yang diinginkan yaitu penyelenggaraan Formula E Jakarta. Hal ini dapat terjadi berkat persiapan dan negosiasi yang serius dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta adanya kesamaan visi dengan FEO mengenai isu lingkungan.

REFERENSI

- Alim, M. I. (2018). Pengaruh Event Balap Sepeda Tour de Singkarak dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Sumatera Barat Melalui Sektor Pariwisata.
- Baswedan, A. (2019, July 14). Anies Rasyid Baswedan on Instagram: "*Alhamdulillah, berhasil! Jakarta akan menjadi salah satu tuan rumah balap mobil bergengsi Formula E di tahun 2020.*" Instagram. <https://www.instagram.com/p/Bz5HzJnArc6/>
- BeritaSatu. (2019, August 14). *Mengapa DPRD DKI Setujui Anggaran Formula E?* [beritasatu.com](https://www.beritasatu.com/archive/569605/mengapa-dprd-dki-setujui-anggaran-formula-e). <https://www.beritasatu.com/archive/569605/mengapa-dprd-dki-setujui-anggaran-formula-e>
- BeritaSatu. (2021, December 18). *Kilas Balik: Ini Asal Usul Gelaran Formula E Jakarta.* <https://www.beritasatu.com/archive/868773/kilas-balik-ini-asal-usul-gelaran-formula-e-jakarta>

- CNN Indonesia. (2019a, July 15). *Anies Soal Jakarta Tuan Rumah Formula E 2020*. https://www.youtube.com/watch?v=30_kXecaT0o
- CNN Indonesia. (2019b, September 20). *Resmi: Jakarta Tuan Rumah Formula E 2020*. <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20190920135117-163-432246/resmi-jakarta-tuan-rumah-formula-e-2020>
- Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta. (2021). *Katanya vs Faktanya Formula E*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/129029/perda-prov-dki-jakarta-no-7-tahun-2019>
- Easton, D. (1988). *Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik*. Jakarta : Bina Aksara, dalam: Mira Amelia. (2017). *Proses Pembahasan Rencana Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional di Sektor Jasa oleh Komisi VI DPR RI*.
- Fitra Eri. (2019, September 22). *FORMULA E JAKARTA X ANIES BASWEDAN*. <https://www.youtube.com/watch?v=DK7LOJTtjPc>
- Formula E. (n.d.). *Terms & Conditions and Privacy Policy*. Formula E. http://www.fiaformulae.com/terms-and-conditions?utm_campaign=2147338_SEASON%208%20-%20DHL%20INCLUSION%20-%20TOGETHER%20GREEN&utm_medium=email&utm_source=FORMULA%20E%20OPERATIONS%20LIMITED
- Jakpro. (2021, October 16). *Resmi, Jakarta Tuan Rumah Balap Mobil Listrik Formula E 2022*. <https://www.jakarta-propertindo.com/resmi-jakarta-tuan-rumah-balap-mobil-listrik-formula-e-2022/>
- JDIH BPK RI. (2014). *UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Khausar, M. (2020). *Strategi Nation Branding Indonesia Melalui Penyelenggaraan Asian Games 2018*.
- Kompas. (2019, September 20). *Formula E Digelar 6 Juni 2020, Anies: Jakarta Akan Jadi Fokus Dunia*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/09/20/17384831/formula-e-digelar-6-juni-2020-anies-jakarta-akan-jadi-fokus-dunia>
- Kompas. (2020, March 11). *Formula E di Jakarta Resmi Ditunda karena Virus Corona*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/03/11/05541511/formula-e-di-jakarta-resmi-ditunda-karena-virus-corona?page=all>
- Kompas. (2022, June 4). *Jalan Panjang Jakarta Jadi Tuan Rumah Formula E*. <https://jeo.kompas.com/jalan-panjang-jakarta-jadi-tuan-rumah-formula-e>
- Kontan. (2019, December 5). *Anies Baswedan jelaskan alasan pentingnya penyelenggaraan Formula E*. <https://regional.kontan.co.id/news/anies-baswedan-jelaskan-alasan-pentingnya-penyelenggaraan-formula-e?page=all>
- Liputan6. (2021, September 30). *PDIP Sebut Penjelasan Pemprov DKI Jakarta Soal Formula E Hanya Angan-Angan*. <https://www.liputan6.com/news/read/4671879/pdip-sebut-penjelasan-pemprov-dki-jakarta-soal-formula-e-hanya-angan-angan>

- Merdeka. (2022, June 8). *Balap Formula E, Persembahan Anies untuk Ibu Pertiwi*. <https://www.merdeka.com/khas/balap-formula-e-persembahan-anies-untuk-ibu-pertiwi.html>
- Mukti, T. A. (2013). *Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri oleh Pemda di Indonesia*. The Phinisi Press.
- PEMROV DKI JAKARTA. (2019, October 1). *20 Sep 2019 Gub Anies Baswedan Konferensi Pers Jakarta ePrix 2020*. <https://www.youtube.com/watch?v=Jwt22CKadVY>
- Pribadi, T., & Muhyidin, A. (2014). *Pendekatan dalam Analisis Sistem Politik*. In *Sistem Politik Indonesia*. Universitas Terbuka.
- Sazli, A. R. (2016). *Analisis Kepentingan Indonesia dalam Penyelenggaraan Asian Games 2018*.
- Tempo. (2019a, July 15). *Negosiasi Jakarta Tuan Rumah Formula E, Anies: Tertib dan Tak Banyak Bicara*. <https://metro.tempo.co/amp/1224640/negosiasi-jakarta-tuan-rumah-formula-e-anies-tertib-dan-tak-banyak-bicara>
- Tempo. (2019b, August 13). *Anies Baswedan Berharap DPRD DKI Setujui Anggaran Formula E*. Tempo. <https://metro.tempo.co/read/1235594/anies-baswedan-berharap-dprd-dki-setujui-anggaran-formula-e>
- TribunJakarta. (2022, June 6). *Penonton Formula E Diklaim Capai 60 Ribu Orang, Anies Terkesan Animo Masyarakat: Sukses dan Lancar*. <https://jakarta.tribunnews.com/2022/06/06/penonton-formula-e-diklaim-capai-60-ribu-orang-anies-terkesan-animo-masyarakat-sukses-dan-lancar>
- tvOneNews. (2022, June 2). *Formula E, Gelaran Olahraga Rasa Politik? | AKIP tvOne*. https://www.youtube.com/watch?v=CTd4xCnSW_I